

**PERUBAHAN KARAKTER KEBUDAYAAN DAN ETOS PRODUKTIVITAS SOSIAL EKONOMI
DITENGAH
PROGRAM KEBIJAKAN PERTANIAN**

***CHANGES IN CULTURAL CHARACTER AND
SOCIAL ECONOMIC PRODUCTIVITY IN THE MIDDLE OF
AGRICULTURAL POLICY PROGRAMS***

M. Alie Humaedi

*Peneliti Utama bidang Kajian Budaya
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
humaedi2014@gmail.com*

Abstract

The people of Aceh and most of the Bukit Barisan Sumatra region in the interior are often overlooked in various studies. In addition to security reasons, the phenomenon of society is considered to be undeveloped. In fact, in many cases, the dynamics of the community are quite strong. Cultural characteristics in ethos and socioeconomic productivity have variations, especially when faced with government or other parties' policies and programs. The problem is, how is the cultural character of the people of Sarah Raya when faced with the surrounding environment? How about the dynamics of the ethos of community productivity in addressing policies and programs related to agriculture? Ethnographic research with in-depth interviews and observation participation found cultural characteristics related to ethos and community productivity. This character is formed based on its touch with the surrounding environment filled with wilderness, rivers and rice fields. Agricultural knowledge and ethos are hereditary. This situation began to change when many NGOs and the post-disaster government began to enter and carry out empowerment activities. The ethos of dependence is clearly visible and replaces the ethic of independence that existed before.

Keywords: Productivity ethos, Cultural Character, Agricultural Policy Program, Sarah Raya.

Abstrak

Masyarakat Aceh dan sebagian besar wilayah bukit Barisan Sumatera yang berada di pedalaman seringkali tidak diperhatikan dalam berbagai kajian. Selain alasan keamanan, fenomena masyarakatnya dianggap tidak berkembang. Padahal, dalam banyak kasus, dinamika masyarakatnya cukup kuat terlihat. Karakter kebudayaan dalam etos dan produktivitas sosial ekonomi memiliki variasinya, terlebih saat dihadapkan dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak lain. Permasalahannya, bagaimana karakter kebudayaa masyarakat Sarah Raya saat diperhadapkan dengan lingkungan sekitarnya? Bagaimana pula dinamika etos produktivitas masyarakat dalam menyikapi kebijakan dan program terkait pertanian? Penelitian etnografis dengan wawancara mendalam dan partisipasi observasi menemukan adanya karakter kebudayaan terkait etos dan produktivitas masyarakat. Karakter ini terbentuk berdasar sentuhannya dengan lingkungan sekitar yang dipenuhi hutan belantara, sungai dan sawah. Pengetahuan dan etos pertanian diperoleh secara turun temurun. Keadaan ini mulai berubah ketika banyak LSM dan pemerintah pasca bencana mulai masuk dan melakukan kegiatan pemberdayaan. Etos ketergantungan sangat terlihat jelas dan menggantikan etos kemandirian yang ada sebelumnya.

Kata Kunci: Etos produktivitas, Karakter Kebudayaan, Program Kebijakan Pertanian, Sarah Raya.

Pengantar

Dari sekian luas daerah Aceh, ribuan desa, ratusan kemukiman dan kecamatan, pastilah ada desa yang menjadi ilustrasi terbaik yang mewakili karakter khusus letak geografis, entitas, produktivitas ekonomi, dan prinsip-prinsip mentalitas dan kebudayaan masyarakat Aceh yang terbaik. Desa itu harus dipilih secara cerdas, bukan asal pilih. Misalnya, ada satu variabel tentang produksi pertanian, maka saat di Banda Aceh informasi tentang desa yang dianggap “terhebat” di bidang pertanian telah dicari. Ada pernyataan bersama masyarakat, bahwa desa itu kebanyakan berada di Tangse, Kabupaten Pidie. Informasi ini kemudian diuji kembali kepada masyarakat di daerah lain. Bila jawabannya tetap Tangse, maka desa pertanian yang menjadi sampel penelitian ini ditetapkan.

Sebuah wilayah yang dianggap umum oleh masyarakat sebagai sebuah desa terbaik dalam bidang-bidang tertentu seolah menjadi “kesepakatan umum” dan sekaligus penghargaan mereka terhadap keberhasilan komunitas tertentu dalam menjalankan kehidupannya. Daerah tersebut dapat menjadi potret umum dari masyarakat Aceh ataupun masyarakat di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakter geografis dan sosialekonomi yang serupa. Terlebih pada satu bentang alam yang sama, yaitu pulau Sumatera, dan atau garis pegunungan atau perbukitan Barisan yang memanjang dari wilayah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara sampai Aceh Darussalam. Bentangan alam perbukitan Barisan ini menjadi menarik karena melewati berbagai wilayah secara administratif, dan menjangkau berbagai kelompok sukubangsa yang

berbeda antara satu dengan lainnya. Di wilayah Lampung, bentangan alam ini dihuni oleh berbagai marga suku Lampung, dan sekaligus para transmigran dari pulau Jawa. Ke arah Barat, perbukitan ini pun dihuni oleh masyarakat Bengkulu yang dominan memiliki kedekatan dengan beragam sukubangsa Cina. Sementara di wilayah perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Muara Enim, ia pun dihuni oleh suku asli dan beberapa sub suku lainnya. Orang-orang Semendau dan wong kito secara umum juga menghuni wilayah perbukitan Barisan itu. bergeser sedikit ke utara atau selatan, perbukitan Barisan juga bertemu di wilayah Sumatera Barat. Di wilayah ini pun, ia ditinggali oleh kelompok-kelompok suku Minang dengan segala subsukunya. Ke arah barat, perbukitan Barisan pun menghampiri sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dominan dihuni oleh puluhan subsuku Dayak Karo, Toba, Samosir, dan kelompok suku pendatang lainnya seperti Jawa, Flores, dan Cina. Bentangan alam ini pun terus berlanjut ke wilayah Aceh. Di wilayah Aceh sendiri, perbukitan barisan ini seolah pecah menjadi dua, yaitu perbukitan yang mengarah ke pantai Barat di satu sisi, dan di sisi lain yang membentang di wilayah pantai Timur. Tidak hanya itu, sebagai wilayah akhir dari perbukitan Barisan, bentangan alamnya sedikit unik karena ia dipertemukan dengan garis-garis perbukitan yang menghubungkan antara pantai Timur dan Pantai Barat. Bentangan alam di wilayah Aceh pedalaman pun terlihat jelas dipenuhi dengan berbagai perbukitan.

Artinya, bentangan alam bukit Barisan yang memanjang di pulau Sumatera dan dihuni

oleh jutaan manusia dengan beragam subsuku di masing-masing wilayahnya akan menghadirkan fenomena tersendiri, khususnya dalam persoalan etos dan produktivitas sosial ekonominya. Fenomena hubungan antara bentangan alam dengan karakter pribadi, bidang mata pencarian, etos, dan pandangan dunia para penghuninya selaras dengan teori cultural materialisme yang ditawarkan oleh Marvin Harris (1988). Ia mengatakan bahwa social behaviour setiap masyarakat akan selalu berbeda, dan perbedaan itu pada umumnya akan dipengaruhi oleh responnya terhadap keadaan alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, etos dan produktivitas orang pantai akan berbeda dengan etos dan produktivitas orang gunung. Demikian juga, mereka yang tinggal di hulu sungai akan memiliki etos dan karakternya sendiri, dan hal ini berbeda dengan mereka yang tinggal di hilir-hilir sungainya. Bentangan alam juga menciptakan karakter kebudayaan yang unik dalam berbagai unsur atau dimensi kebudayaannya. Keragaman seni budaya, desain rumah, teknologi, dan bahkan variasi kuliner pun sangat kental dipengaruhi oleh keberadaan manusia pada bentangan alam tertentu. Berdasarkan pandangan di atas, maka menelisik aspek etos dan produktivitas masyarakat yang berada pada suatu bentangan alam tertentu, khususnya mereka yang berada di bukit Barisan menjadi sangat strategis untuk memetakan secara khusus tentang karakter kebudayaan dan nilai-nilai yang tertanam dari kelompok masyarakat penghuninya. Pemahaman atas karakter kebudayaan ini menjadi penting ketika diperhadapkan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan

masuk. Saat kebijakan yang ada dianggap tidak sesuai dengan karakter kebudayaannya, maka masyarakat akan sulit berpartisipasi, dan tentu hal ini akan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan pembangunan di masyarakat. Namun, ketika sebuah kebijakan atau program pembangunan bisa sesuai dengan karakter kebudayaannya, maka tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi, dan hal ini akan mengarah pada potensi keberhasilan pembangunan yang masuk ke wilayahnya.

Oleh karena itulah, potret karakter kebudayaan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu menjadi sangat strategis dalam ranah pembangunan.

Dengan demikian, tulisan ini hendak mempermasalahkan, bagaimana karakter kebudayaan masyarakat Sarah Raya saat diperhadapkan dengan lingkungan sekitarnya? Bagaimana pula dinamika etos produktivitas masyarakat dalam menyikapi kebijakan dan program terkait pertanian? Pertanyaan ini setidaknya akan menghadirkan pemahaman mendalam atas *social behaviour* dan karakter kebudayaan kelompok masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, sehingga kita dapat menarik dan memosisikan dengan tepat dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang ada.

Pembahasan

Desa Sarah Raya: Ilustrasi Sebuah Wilayah Bentangan Alam Bukit Barisan

Desa Sarah Raya adalah pemekaran dari Desa Alue Jang. Wilayahnya masuk ke dalam kemukiman Sarah Raya bersama lima desa lain: Alue Jang, Ceuraceu, Alue Punt, Tuwi Peuriya, dan Bukit Keumeuneng. Desa ini terletak paling dalam di Kecamatan Teunom

Aceh Jaya dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Woyla di Aceh Barat. Desa ini masuk dalam kategori desa pedalaman. Hak *ulayat* hutan yang begitu luas dimilikinya, yaitu 120.000 hektar. *Ulayat* desanya dianggap paling luas di wilayah Aceh Jaya, hampir mendekati luas *ulayat* desa-desa di pegunungan Leuser Kabupaten Gayo Lues dan menjadi potret umum sebuah pedesaan yang berada di bentangan alam Bukit Barisan. Hak *ulayat* di desa-desa ini rata-rata mencapai 100.000 hektar.

Untuk mencapai Desa Sarah Raya dari Kecamatan Teunom membutuhkan waktu tiga jam. Meskipun jaraknya relatif pendek, yaitu 45 km, tetapi jalan yang dilalui persis seperti “tali air” penuh batu. Beberapa desa dalam permukiman Sarah Raya terlewati, termasuk muka desa balik bukit yang dibuka untuk program transmigrasi penduduk Jawa di tahun 1980-an. Kebun sawit, kopi, cokelat, dan karet yang berada di sepanjang jalan, pada perjalanan lapangan tahun 2010-an tidak lagi terawat karena ditinggalkan pemiliknya. Puing-puing bangunan yang terbakar sisa konflik masih tampak. Hawa kesedihan seolah meratapi sepanjang perjalanan ke Sarah Raya.

Desa Alue Jang menjadi pintu masuk mencapai wilayah Sarah Raya. Desa Alue Jang terletak di sisi Krueng Teunom, sementara itu Sarah Raya berada di sisi lain dari sungai selebar 108 meter. *Gethek* yang diikat tali, dan digerakkan melalui tenaga arus sungai, tanpa mesin merupakan pemandangan dan moda transportasi “canggih” untuk mencapai Sarah Raya. *Gethek* jenis ini menjadi praktik teknologi terapan model pedesaan yang paling berkesan. Meskipun, ada potensi teknologi terapan

yang bisa juga diterapkan di pedesaan ini, yaitu listrik bertenaga air. Rupanya hampir tiga tahun, kemukiman Sarah Raya tidak mendapat listrik PLN. Kabel listrik sepanjang Teunom-Sarah Raya dicuri orang pasca bencana tsunami yang menimpa wilayah-wilayah pantai Barat dan pantai timurnya

Padamnya listrik di Sarah Raya sedikit banyak mematikan atau menghentikan aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Shalat Magrib, Isya, dan Shubuh secara berjamaah di masjid tidak lagi didirikan, pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak beserta *debaan* (*barzanzian*) dan *tawajjuh* tidak lagi diselenggarakan. Perkampungan menjadi senyap dan gelap. Aktivitas malam hari betul-betul dibatasi. Anak-anak kecil yang mengaji di *meunasah* dibatasi, tidak lebih dari jam 20.00. Anak-anak besar yang mengaji *tilawatil Qur'an* diwajibkan menginap di rumah ustadzahnya. Hanya ada dua kedai yang diterangi lampu listrik yang berasal dari genset yang dimilikinya.

Setiap malam, dua kedai itu menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dan beberapa anggota masyarakat untuk sekadar menonton sinetron “tidak bersuara” karena jauhnya jarak menonton dan ramainya orang. Di satu sisi masyarakat merasa kehilangan atau mengalami kerugian saat listrik tidak mengalirinya. Di sisi lain, masyarakat merasa beruntung listrik padam di desanya, karena bayaran per bulannya terlampau besar. Tak jarang, masyarakat pemakai harus membayar lebih dari Rp. 100.000 per bulan. Padahal pemakaian listrik mereka relatif sedikit. Penyebabnya, tidak ada petugas pencatat kilometer yang berkeliling setiap bulannya. Nilai tarif hanya dilakukan secara terka-terkaan saja. Semua kerugian PLN

.Teunom seolah dibebankan secara merata kepada seluruh masyarakat di Kemukiman Sarah Raya.

Dalam sejarah pedesaannya, penduduk awal Sarah Raya berasal dari orang Pidie pelarian. Jumlahnya sekitar 12 orang. Orang Pidie yang berjuang melawan Belanda maupun raja/*uleebalang* lokal melarikan diri ke beberapa daerah di pantai Barat, termasuk Sarah Raya, Panga, Kuala Tripa, dan Blang Pidie. Selain itu, ada pula para pemburu emas dari Sungai Emas yang tidak sampai ke wilayah Geumpang. Mereka adalah orang Aceh dari Peureulak yang dibawa oleh kapal Nisero. Kapal ini sendiri kemudian tenggelam di bibir pantai Teunom-Panga. Kehadiran orang Inggris dan orang yang dibawanya dimanfaatkan oleh Sultan Teunom untuk mengganggu kekuasaan ekonomi politik *uleebalang* di Meulaboh dan kekuatan bangsa Eropa lainnya.

Sekitar 12 orang lokal di atas lalu mencari penghidupan sendiri, dan sampailah berita mengenai aliran sungai emas dari wilayah Geumpang. Mereka kemudian menuju wilayah Sarah Raya. Mana yang pertama dan mana terakhir, penduduk Sarah Raya tidak begitu mengetahui persisnya. Tetapi, bila dirunut kesejarahannya, peristiwa Nisero sendiri terjadi di tahun 1883-1885, yaitu sebuah kapal Inggris yang mengangkut gula dari Surabaya, dan dipimpin oleh Kapten Woodhouse. Para awaknya yang ada menjadi "bahan lobby dan negosiasi" dari Teuke Imam Muda Teunom. Belanda menuduh bahwa

1. Desa Trans ini akhirnya ditinggalkan penduduk saat Daerah Operasi Militer (DOM) dan konflik masa "Tertib Sipil." Mereka dibunuh, diculik, dan kerap diancam oleh orang-orang yang tidak dikenal. Rumah dan fasilitasnya dibakar. Orang Jawa pergi ke wilayah-wilayah pesisir Teunom dan Meulaboh, beberapa lainnya dapat pulang ke Jawa atas pembiayaan sendiri bagi yang mampu, atau ikut truk-truk militer dan pesawat Hercules. Mereka tercecer sepanjang garis pantai barat, ada juga sebagian lain pergi ke Medan karena kedekatan emosional dengan orang-orang Jawa transmigran semasa politik etis van Deventer diberlakukan.

kapal Nisero sengaja dikandaskan untuk memperoleh asuransi atau untuk menyelundupkan senjata bagi orang pergerakan di wilayah pantai Barat termasuk wilayah Pidie. Tentunya, perjuangan orang Pidie lebih dahulu hadirnya ketimbang peristiwa tenggelamnya Nisero. Ada dugaan jangankan Sarah Raya menjadi tempat barter atau penyimpanan selundupan senjata kepada orang pergerakan di Pidie dan Lango seperti yang dituduhkan oleh Belanda.

Orang Pidie memang dikenal sebagai kelompok sukubangsa yang kokoh dalam pendirian, tidak segan mengkritik dan militan dalam menolak sesuatu yang dianggap lalim, sekaligus mempunyai karakter jiwa pengembara lebih besar dibandingkan orang Aceh lainnya. Hampir semua daerah terdapat kantong-kantong orang Pidie.

Mereka berusaha apa saja ketika sampai di wilayah tertentu. Di samping itu, kemampuan dan pengetahuan agama yang lebih tinggi telah menempatkan orang Pidie masuk dalam kategori kelompok elite penyiar agama Islam di pedalaman Aceh. Kehebatan semacam itu diwariskan secara turun temurun, dan lahir semacam mitos yang melegenda hampir di seantero Aceh. Ada ungkapan “orang Aceh adalah orang Pidie, maka beruntung menjadi orang Pidie.” Termasuk saat penyusunan dan perjuangan organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dahulu yang melahirkan beberapa tokoh, dan pejabat teras setingkat gubernur (Irwandi Yusuf).

Hutan: Lahirnya Sebuah Etos dan Produktivitas Perekonomian Warga

Sungai arus deras menjadi aset wilayah Teunom secara keseluruhan, khususnya bagi Sarah Raya. Krueng Teunom tidak semata dipakai untuk irigasi primer pertanian, juga untuk kebutuhan air minum dan MCK. Hanya tiga dari 89 rumah yang memiliki sarana MCK di dalam rumah. Selebihnya, meskipun memiliki sumur air, fasilitas MCK tertuju pada pemanfaatan sungai. Jumlah penduduknya pada tahun 2010-an mencapai 109 KK atau 420 jiwa yang menempati luas permukiman sekitar 33 hektar. Tanah selebihnya adalah tanah perkebunan dan sawah (blang) yang dimiliki secara pribadi, dan hak ulayat desa berupa hutan yang mencapai 100.000 hektar. Beberapa bukit penuh pohon dan semak belukar masuk ke wilayah ini dan mengelilingi **D e s a S a r a h R a y a .**

Hak ulayat hutan inilah yang kerap dimanfaatkan para pemburu kayu ulin (kerak alin) dari Jambi dan orang Semendeau di Sumatera Selatan. Mereka secara berombongan, sekitar 20-30 orang mencari kerak alin selama 20 hari di hutan. Kayu jenis ini dikupas dan inti batangnya dipergunakan sebagai bahan baku minyak wangi, persis seperti minyak cendana. Harga satuan kilo mencapai Rp. 12.000.000,-. Orang Jambi dan orang Semendau selalu merahasiakan model, karakteristik, dan bentuk pohon ulin. Mereka seolah tidak mau tersaingi dalam perburuannya di tengah hutan.

Menurut mereka “kerak alin jumlahnya sudah sangat sedikit, karena itu sulit sekali didapatnya. Hanya di hutan-hutan Aceh yang masih ada kerak alin, di hutan lain di pulau Sumatera hampir dapat dikatakan sudah tidak

2. Gethek semacam ini ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kampung Baru dan Sekerak dalam perjalanan menuju desa Sekumur dan Sulum, tidak melalui rute Pulo Tiga.

3. Seandainya pihak pendamping masyarakat dapat melakukan pengembangan teknologi semacam ini, pasti temuan itu dapat menjadi jalan untuk menggugah partisipasi masyarakat di Sarah Raya. Teknologinya bisa meniru model di wilayah Kasimpar Petungkriyono Pekalongan Jawa Tengah.

ada lagi. Pencarian rizkinya sudah semakin sulit.”

Mereka akan langsung menempuh jalur hutan sewaktu berangkat. Tidak mau mengambil jalur sungai, karena dianggap lama, berliku, dan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan kerak alin dalam perjalanan merambah hutan. Sebelum naik ke hutan, mereka menginap dua malam lebih dahulu di Sarah Raya (desa sekitar hutan). Tujuannya, mempersiapkan bekal dan izin penggunaan ulayat kampung. Adat kampung sendiri telah menetapkan setiap rombongan pemburu kerak alin dikenakan kutipan sebesar Rp. 500.000 untuk kepentingan meunasah, dayah, masjid, dan kampung. Jumlah uang itu harus dibayarkan di muka, sebelum mereka naik ke hutan. Biaya kutipan yang terlalu besar ini sebenarnya dikeluhkan oleh para pemburu kerak alin.

Ada potongan wawancara yang memuat aspek kerak alin dan persoalan tentang masyarakat sekitar hutan Aceh.

“Dengan uang Rp. 500.000 di muka, belum tentu kami dapat kerak. Modal yang dikeluarkan sudah terlalu besar, bisa jadi dan tak jarang sepuluh ini kami malah harus menjual kebun kami di kampung karena terkena hutang pada tauke-tauke Medan. Kami buka hutan, kami buat jalan yang

sebenarnya berguna juga buat masyarakat kampung, tapi akhirnya kami juga dikutip sekian besar oleh mereka. Sulit memang berhadapan dengan orang sekitar hutan ini. Semuanya harus dituruti, kalau tidak, seperti kami ini sekarang, masih disandera untuk tidak boleh ke hutan, karena kami tidak bisa dan tidak sanggup membayar uang Rp. 500.000. Kami hanya mampu memberikan uang kepada mereka sebesar Rp. 325.000 saja.”

“Kami sendiri untuk sampai ke Sarah Raya telah menghabiskan uang Rp. 600.000 per orang. Uang itu digunakan untuk perjalanan dan makan dari Jambi, dan sebagian lagi ada yang berasal dari Semendau ke Medan, Medan-Banda Aceh, dan Aceh-Teunom. Setelah perdamaian, kami sudah beberapa kali ke hutan Aceh, ke Sarah Raya baru sekali ini. Sebelumnya melalui rute Geumpang, dan mungkin nanti ini keluarnya lewat Geumpang. Selama konflik terjadi, tidak ada satu pun rombongan seperti kami yang berani masuk ke hutan Aceh. Bisa-bisa kita dianggap sebagai GAM oleh TNI/Polri, atau mata-mata TNI/Polri di mata GAM. Belum lagi terkena kutipan dari kedua belah pihak, bukan hasil untung yang didapat tetapi rugi bahkan nyawa bisa melayang.”

Mengapa kehadiran rombongan pemburu kerak alin menjadi penting di Desa Sarah Raya? Kehadiran mereka sesungguhnya dapat memberi contoh baik kepada masyarakat, bahwa tidak semua orang yang masuk ke hutan bertujuan pada usaha perambahan hutan yang bersifat illegal logging. Sepuluh tahun terakhir sebelum Moratorium Logging diluncurkan oleh Gubernur Aceh, hutan ulayat Sarah Raya dan Woyla pernah dibabat oleh PT Boma yang mengantongi izin HPH seluas 10.000 hektar.

4. Anthony Reid, *The Contest for Sumatra Aceh, the Netherlands and Britain 1858-1898*, New York: Oxford University Press, 1969, hlm. 36-37.

5. Ketika ditanya seperti apa bentuknya, di antara mereka ada yang mengatakan seperti batang pohon pisang, ada juga yang mengatakan seperti keladi, karet, kemiri, dan pohon lain. Ada fokus “pengkeliruan” atau pemalingan aspek kebenaran dari jenis pohon ini. Mereka pun tidak pernah mau mengatakan berapa jumlah hasil setiap perburuan kerak alin, dan dimana mereka menjualnya. Mereka hanya mengatakan cukup untuk ongkos pulang pergi ke Jambi atau ke Sumatera Selatan, biaya hidup selama perjalanan, biaya keluarga, dan mereka jual kepada para tauke yang sudah menunggu di suatu tempat tertentu. Pada awalnya peneliti ingin sekali mengikuti perjalanan perburuan mereka, tetapi sempitnya waktu, fasilitas peralatan yang dibawa kurang memadai, dan pengalaman survivor di tengah hutan yang kurang cukup membuat peneliti harus mengurungkan niat itu. Ketertarikan peneliti adalah keberanian hidup mereka selama di hutan dengan perbekalan yang minimal, jenis kerak alinnya sendiri, dan kebanyakan di antara para pemburu itu adalah suku keturunan Anak Dalam dan orang asli Semendau.

Perusahaan ini telah banyak merusak hutan Sarah Raya, dan memberi contoh tidak baik bagi masyarakat untuk melakukan illegal logging walaupun bersifat sederhana. Dalam satu hari masyarakat Sarah Raya dan Alue Jang, minimalnya dapat menebang dan membelah kayu beberapa jenis pohon sebanyak 10 ton.

Masyarakat yang mempunyai jenis pekerjaan penebang sekitar 22 orang dan 6 orang yang berasal dari Singkil. Mereka dikuasai atau dikelola oleh dua orang tauke Sarah Raya. Belum ditambah para penebang dari Alue Jang, jumlahnya mencapai 14 orang dengan satu orang tauke. Semua tauke menggunakan sampan untuk mengangkut kayu, bila rambahannya berdekatan dengan krueng Teunom. Bila tebangannya berada di tengah atau titik samping pedesaan, kayunya diangkut dengan cara berjalan kaki. Kayu-kayu belahan hasil tebangannya kemudian diangkut dan dijual ke tauke Teunom, Calang, dan Meulaboh.

Kayu-kayu di atas, pada fase recovery pasca bencana tsunami di Aceh merupakan bahan baku material rumah-rumah rekonstruksi yang dibuat BRR, NGO, dan pemerintah asing. Setiap tiga hari sekali, satu mobil Fuso ukuran besar dan satu truk PS 150 mengangkut hasil belahan itu. Para tauke yang membawa truk-truk itu, menurut orang setempat, merupakan orang-orang KPA atau mantan GAM. Menurut masyarakat, pasca

MoU, TNI/Polri tidak lagi ikut-ikutan melakukan illegal logging di kawasan ini. Posisi mereka diambilalih oleh orang-orang KPA. Disamping faham dan menguasai medan hutan, mereka juga menguasai jaringan distribusi “tanpa surat” ke sebagian besar kontraktor rekonstruksi permukiman p a s c a t s u n a m i .

Di hari-hari pertama kehadiran peneliti di tengah masyarakat, para penebang hutan, kata masyarakat, menghentikan kegiatan illegal logging mereka. Ada dugaan bahwa Gubernur telah mengirim PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil) untuk menegakkan komitmennya tentang moratorium logging. Setelah hari ketiga, mereka kemudian telah berani mendekati peneliti dan menyatakan bahwa perambahan hutan yang dilakukan bersifat sederhana, dan hanya dilakukan sesuai kebutuhan keluarga saja.

Mereka beralih, bahwa kegiatan ini telah disetujui geuchik dan forum tengku sesepuh kampung (Tuha Peut Gampong). Bukti dari persetujuan ini adalah setiap tauke harus memberikan kompensasi kepada kas kampung senilai Rp. 2.000.000 per bulan atau per Rp. 200.000 per sekali angkutan truk. Para pelaku juga menegaskan usahanya dilakukan dengan maksud membantu korban tsunami untuk segera mendapatkan rumah bantuan yang dijanjikan pihak Donor. Menurut mereka, kendala terbesar dalam proses dan keterlambatan pembangunan rumah adalah ketersediaan bahan baku material kayu. Ada dalih kemanusiaan yang disisipkan bahwa selagi mereka tidak dapat membantu secara material kepada saudara-saudara Acehnya yang terkena tsunami, maka dengan pekerjaan seperti itu, mereka dapat membantu para korban tsunami tersebut.

6. Wawancara dengan Zenal (Zainal-pen), seorang pemuda lulusan SMP yang ikut bersama kakak dan ayahnya untuk memburuh kerak alin di Sarah Raya, 19 Mei 2010.
7. Pernah ada rombongan pemburu kerak alin yang menunda pembayaran setelah perburuan, karena ketiadaan uang. Mereka meninggalkan 22 KTP di rumah geuchik Abdullah dan berjanji akan menyelesaikan biaya kutipan itu. Tetapi, sampai tiga bulan pun mereka tidak pernah kembali lagi ke kampung Sarah Raya. Mereka dianggap melarikan diri.
8. Wawancara dengan Hayat, pemimpin rombongan kerak alin dari Jambi, 19 Mei 2010.
9. Satu ton kayu ukuran tauke Aceh adalah sebanyak 15 batang dari lembar-lembar kayu seukuran 20 cm x 2cm x 4 mt.

Argumen kemanusiaan di atas muncul akibat banyaknya permintaan kayu. Anehnya juga, banyak NGO bahkan BRR sendiri membangun rumah dengan struktur penuh menggunakan kayu.

Proses rekonstruksi yang dilakukan di Aceh tidak selurus dengan kebijakan illegal logging yang diterapkan pemerintah pusat maupun kebijakan moratorium logging pemerintah NAD. Penghargaan atas ekosistem tidak dikedepankan dalam skema hijau atau master plan mereka. Peristiwa banjir bandang di Simpang Seumadam dan Lawe Beringin Gayo di Aceh Tenggara; Sekumur, Sulum, dan beberapa desa lain di Aceh Tamiang antara tahun 2006 sampai 2008 disinyalir merupakan dampak dari penebangan hutan untuk kebutuhan kayu rekonstruksi pasca tsunami di Aceh pantai barat dan pantai timur. Hubungan semacam ini dapat menempatkan NGO dan BRR dengan program dan kebijakan rekonstruksinya sendiri merupakan pelaku atau penadah dari illegal logging. Dalam ingatan kolektif, tidak ada kebijakan atau komitmen pemerintah yang mengarahkan pelarangan kayu hutan sebagai bahan material rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Kehadiran pemburu kerak alin dari Jambi dan Sumatera Selatan sebenarnya dapat dijadikan contoh menarik pemberdayaan ekonomi non illegal logging untuk masyarakat Sarah Raya khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Meskipun mereka keluar masuk hutan, tidak untuk menebang hutan secara sembarangan. Mereka hanya memilih kayu ulin, satu dari seribu pohon, bahkan satu dari sepuluh ribu pohon di hutan, baru mereka tebang. Kerja seperti ini tidak pernah ditiru oleh orang Sarah

Raya, padahal potensi kayu alin masih banyak seperti diakui oleh orang-orang Jambi dan orang Semendau itu sendiri. Masalah pengetahuan tentang jenis pohon ini hanya masalah teknis saja.

Etos Produktivitas Blang untuk Kebutuhan Harian

Selain menjadi penebang pohon hutan, penduduk Sarah Raya kebanyakan menjadi pekebun dan bersawah (blang). Tanaman kebun paling banyak ditanam adalah buah pinang, kopi, dan cokelat. Beberapa petani sengaja menanam kelapa untuk mendapatkan produksi kopra, sebagian lagi menanam pohon durian, mangga, dan dukuh. Hampir semua penduduk menanam pohon pinang. Pohon ditanami sepanjang jalan sebagai pagar rumah dan kebun, juga pagar sawah. Pohon ini paling cocok diselang-selingi dengan pohon lain. Buahnya dijual kepada tauke setempat, atau kepada muge (bakul) yang sengaja berkeliling untuk mencari buah pinang di desa setempat.

Ada dua orang penduduk yang khusus menjadi tauke buah pinang. Mereka merangkap pedagang warung kelontong. Mereka membeli buah pinang basah (sudah dibelah) seharga Rp. 1.700. Sebaliknya pinang kering, mereka beli dari masyarakat seharga Rp. 2.200-2.300. Harga ini berbeda sedikit dengan harga kelompok muge (bakul keliling). Muge berani membeli pinang basah terbelah seharga Rp. 1.750-1.800; sedangkan pinang kering dihargai Rp. 2.400-2.500. Namun, kedatangan mereka jarang ke Sarah Raya, hanya satu kali dalam sebulan. Mereka terkendala transportasi dan penyeberangan. Padahal masyarakat kerap membutuhkan uang tunai untuk membeli kebutuhan sehari-

hari. Karena itu, penduduk lebih sering menjual buah pinangnya kepada dua orang tauke yang merangkap menjadi pedagang kelontong tadi. Ada semacam jaminan, bila mereka menjualnya ke tauke pedagang, sewaktu-waktu mereka bisa berhutang barang kebutuhan di tempat itu. Tanpa harus menunggu uang cash dari penjualan buah pinangnya.

Harga buah pinang di Sarah Raya sangat berbeda dengan beberapa daerah lain. Harga di sini dianggap paling murah dibandingkan desa yang segaris dengan wilayah Aceh Jaya dan Aceh Barat. Di pasar Teunom, tauke setempat membeli buah pinang basah seharga Rp. 1.900-2.000; dan buah pinang kering seharga Rp. 2.400-2.700. Mereka kemudian menjualnya ke Banda Aceh atau Medan. Bila ke Banda, harga jualnya mencapai Rp. 2.800 untuk pinang basah, dan Rp. 3.800 untuk pinang kering. Kebanyakan tauke Teunom menjualnya ke Medan, mereka bisa mendapatkan harga per kilo buah pinang basah sebesar Rp. 4.400-4.600 dan Rp. 7.000-8.500. Setelah di Belawan terkumpul, Cina-Cina Medan kemudian mengekspor kembali ke India dan Eropa. Harga eksportir mencapai \$US 2 per kilo pinang kering. Semua ekspor pinang harus berbentuk kering. Di samping berbiaya murah, hasilnya lebih menguntungkan. Untuk menjadikan satu kilo buah pinang kering membutuhkan 1,3-1,4 kg pinang basah

Harga jual eksportir pinang sangat mahal, sebaliknya harga di tingkat petani Sarah Raya sangat rendah. Dengan kasus ini, petani Sarah Raya mempunyai bahasa satir "petani disini banyak kerja, tetapi sedikit uang." Perputaran uang di kampung ini memang sangat kecil. Dua tauke yang merangkap

menjadi pedagang kelontong sendiri menyatakan hal itu. Dalam sehari, uang masuk termasuk laba (omzet penjualan) dagangan tidak mencapai Rp. 100.000. Omzet itu merupakan hasil pembelian barang non-pangan, seperti sabun, pasta gigi, minyak, lampu, tembakau, dan item lainnya.

Untuk mengatasi kebutuhan pangan, yaitu beras, hampir 90 persen penduduk membuka dan mengelola sawah di sudut kanan kiri desa sekitar hutan atau dibawah perbukitan penuh hutan. Ada dua kawasan persawahan penduduk. Satu disebut blang dalam, dan lain disebut blang krueng. Blang dalam mencapai luas 45 hektar dan dikelola oleh 52 KK. Sedangkan, luas blang krueng sekitar 38 hektar. Sawah ini dikelola 29 KK. Blang dalam mempunyai kecenderungan sawah rawa, airnya terkontaminasi dengan akar-akar pohon tebangan, dan terletak di sekitar tanah gambut. Irigasi air gunung tidak diikuti dengan sistem tali air yang memadai. Tali air tidak dibuat sedemikian rapi. Air yang datang dari tali air bukit seolah dibiarkan begitu saja tanpa diberi saluran-saluran ke semua arah. Ada juga beberapa sumur yang dibuat, selain untuk memenuhi kebutuhan air minum dan MCK selama di sawah, air sumur pun digunakan untuk mengairi sawah bila terjadi kelangkaan air bukit. Sementara itu, blang krueng, meskipun dekat air atau sungai, tetapi air sungainya tidak dapat dinaikkan ke sawah. Letak sawah berada di atas sungai. Teknologi kincir untuk menaikkan air belum dikenal. Sawah akhirnya hanya diairi dari tali air kecil dari anak sungai di atas bukit.

Hasil panen dua jenis sawah di atas sama-sama tidak begitu banyak. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan satu keluarga yang terdiri dari 5-7 anggota. Masa

tanam sekali panen dalam setahun. Bibit yang digunakan merupakan bibit turun temurun atau biasa disebut bibit dewa. Penggunaan pupuk tidak begitu lumrah di tengah masyarakat. Harga pupuk yang mahal dan ketiadaan pengetahuan jenis-jenis pupuk dari penyuluh pertanian menjadi alasan tersendiri mengapa pupuk tidak begitu merakyat. Mereka hanya mengandalkan humpuss atau unsur hara tanah saja. Hal ini yang mempengaruhi hasil panen.

Dari satu hektar sawah yang dimiliki hanya mendapatkan 6-8 ujung, atau sekitar 2-3 ton. Pemanenan padi dalam satu hektar pun tidak dilakukan secara serempak, tetapi menyicil. Satu sisi petak padi bisa dipanen pada umur 7 bulan, sisi lainnya baru bisa dipanen 8-9 bulan. Selisih satu bulan itu dipergunakan untuk menunggu batang padi yang dipanen sebelumnya dapat menghasilkan bulir padi kembali atau mematangkan bulir padi yang masih kompong. Padi yang diambil di bulan ketujuh tidak begitu baik kualitas berasnya. Berasnya terasa hambar dan tidak mengenyangkan. Bila orang memakannya akan mudah terasa Lapar kembali. Lain dengan padi yang dipanen di usia 9-10 bulan. Kualitas berasnya pulen, mengenyangkan, dan tahan lama bila disimpan.

Saat pemanenan pertama, masyarakat biasanya langsung mengira berapa ujung (ikat) yang akan diperolehnya. Karena itu mereka akan segera mengeluarkan zakat padi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh imum meunasah (imam masjid). Dari 6 ujung padi yang didapat, zakatnya sebesar 2 taleun (1 taleun=50 kg=100kg). Zakat padi masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengajian di dayah (termasuk

membayar para tengku dan imum), meunasah, dan pembangunan masjid. Masalah pembagiannya telah ditentukan oleh forum masyarakat dan tengku, semacam ahlu ahli wal aqdi, tepatnya Tuha Peut Gampong.

Setelah dikeluarkan zakat, semua padi yang diperoleh dimasukkan ke semacam lumbung khusus padi, baik yang berada di rumah ataupun tempat istirahat (gubuk) di sawah. Simpanan padi ini masih berbentuk ikatan padi yang digantung. Pembuliran padi (mujek) dan ngangin hanya akan dilakukan saat kebutuhan atas beras telah tampak. Penggilingan padi pun dilakukan tidak secara serempak dalam jumlah besar. Tetapi juga menyicil sesuai kebutuhan beras keluarga. Dari satu goni seukuran 40-50 kg, penggilingan (kilang) padi mengenakan biaya 1-2 bambu (1-2 kg kurang sedikit) beras.

Dalam perhitungan masyarakat, satu hari suatu KK yang terdiri dari 5-7 orang bisa menghabiskan konsumsi beras sebanyak 6 bambu (1 bambu=9 ons atau sekitar 5,4 kg dalam satu hari). Kalau jumlah ini dikalikan 360 hari, berarti dalam satu tahun penyerapan beras satu keluarga mencapai 1.944kg atau sejumlah 2,5 ton gabah kering. Serapan konsumsi beras yang besar ini disebabkan pola makan dan prinsip-prinsip orang Aceh pedesaan umumnya, yaitu "daripada jajan di kedai, lebih baik perut kenyang" Jumlah ini harus ditambah dengan beberapa kegiatan masyarakat dan zakat yang membutuhkan penggunaan beras. Ada keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan beras, karena hasil panen berlebih atau luas tanahnya melebihi perhitungan di atas. Tak jarang pula beberapa atau sebagian keluarga di Sarah Raya b e r k e k u r a n g a n b e r a s .

Untuk menyiasati kekurangan beras di

atas, ada dua cara yang biasa mereka lakukan. Pertama, cara memberdayakan diri, yaitu mereka ikut membantu mengolah sawah orang yang memiliki tanah berlebih; atau ikut membantu proses tanam dan panen. Kegiatan ini akan mendapatkan satu talen pada satu masa panen dari satu orang. Kedua, cara berhutang padi, dan akan dibayarkan bila musim panen datang, atau sesuai akad peminjaman. Padi dapat dibayar dengan padi, bisa juga dibayar dengan uang tunai. Uang ini didapatkan dari "ikut orang" dalam kerja tenaga, seperti membangun rumah atau membelah kayu. Uang bisa juga ada karena hasil panen dari komoditas perkebunannya, seperti menjual pinang, kopra, lada, cengkeh, coklat, dan durian. Jenis-jenis ini adalah komoditas umum dari wilayah perkebunan dan pertanian yang berada di bukit Barisan pulau Sumatera.

Penanaman jenis komoditas di atas sebenarnya tidak dikelola begitu baik dalam satu tempat khusus tertentu. Mereka menanamnya hanya menjadi tanaman sisipan dari tanaman lain secara acak. Jadi, dalam satu kebun bisa jadi empat lima jenis komoditas ada. Jarang tampak ada kebun khusus cengkeh, kopi, coklat, dan durian. Dalam kategori ini, hasilnya pun tidak begitu maksimal, karena sistem perawatan pun tidak memadai. Seolah tanaman hanya tumbuh sendiri. Padahal komoditas selain pinang relatif lebih mahal harganya. Harga cengkeh kering mencapai Rp. 22.000, coklat Rp. 18.000, kopi Rp. 8.000, karet Rp. 4.400, dan durian minimalnya Rp. 4.000 per buah.

Masyarakat melakukan diversifikasi pertanian, tapi pengolahannya tidak diiringi pengetahuan dan jaringan distribusi yang memadai. Pernah ada tawaran semacam

Program Pengembangan Kecamatan di tahun 1999. Saat itu ada dua pilihan pemberian bibit yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat di Kemukiman Sarah Raya, yaitu bibit kelapa dan karet. Masyarakat Sarah Raya memilih bibit kelapa. Waktu itu pertimbangannya adalah mudah ditanam, praktis, tahan hama, harga kopra tinggi, dan cepat digunakan untuk kebutuhan. Tidak ada satu pun warga memilih bibit karet.

Tidak demikian halnya masyarakat Alue Jang, tetangga desanya lebih memilih bibit karet. Hasil ekonomis dari karet telah dapat dinikmati beberapa tahun terakhir ini. Tingkat kesejahteraan mereka lebih tinggi dibandingkan desa-desa di kemukiman Sarah Raya pada umumnya. Ada prinsip dalam menanam pohon karet, bila seorang anggota masyarakat memiliki dua hektar penuh pohon karet, sebanyak 1.000-1.300 batang, maka dalam lima tahun setelah masa tanam, si pemilik tinggal menikmati hasil sampai akhir hayatnya. Pohon karet ini pun dapat diperbarui dan diwariskan kepada anak cucunya. Dari 1.000 batang, 2/3 nya akan mengeluarkan getah terus menerus. 11

Setiap pohon dapat mengalirkan getah per harinya sekitar 50 gram. Bila 50 gram dikalikan 700 batang yang dideres, maka hasilnya sekitar 35 kg/hari. Harga jual getah mentah di tempat sekitar Rp. 3.000, maka hasil per harinya mencapai 105.000 atau Rp. 3.150.000 per bulan. Kalkulasi ini adalah perhitungan hasil minimal. Beberapa orang dapat dipekerjakan dengan bayaran sesuai kesepakatan seperti 20-30 persen hasil deresan getah atau upah harian. Para pekerja biasanya berasal dari masyarakat yang tidak memiliki tanaman karet, tetapi memiliki tanah untuk sawah atau kebun yang ditanami pohon

musiman.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Alue Jang tampak dibuktikan dengan model bangunan rumah menggunakan tembok dan struktur atap genting. Ditambah banyaknya jumlah kendaraan roda dua, dan beberapa roda empat. Kepemilikan genset dan televisi menjadi perhitungan sendiri dalam perbandingan kesejahteraan mereka dengan masyarakat Desa Sarah Raya. Melihat makin berkembangnya tingkat sosial ekonomi masyarakat Alue Jang, beberapa anggota masyarakat Sarah Raya berusaha mencontoh penanaman karet baru beberapa bulan terakhir. Namun, niat itu kembali dibatalkan setelah NGO ADRA (Adventist Development Relief Agency) bersama Palang Merah German mengadakan program bantuan bibit kacang tanah, pupuk, dan pagar besi jeruji untuk mencegah hama babi.

Kacang tanah dipilih ADRA sebagai jenis tanaman pendek untuk maksud penyediaan dana tunai cepat (cashcrop). Masa tanam sampai panen hanya membutuhkan waktu 40-60 hari saja. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi atau mengisi kekosongan dana tunai yang dimiliki masyarakat saat menunggu pohon musiman dapat dipanen. Masyarakat menerima bibit kacang, dengan perhitungan satu hektar kebun/ladang membutuhkan 6 kg biji kacang tanah, berupa kacang kulit sebanyak 10-12 kg/hektar. Selain itu, pupuk Urea (Za) sebanyak 100 kg/ha, juga 200 mt pagar kawat/ha diberikan per setiap hektarnya.

Kawat pagar di atas dikeluhkan masyarakat akibat tipisnya ketebalan kawat. Bisa jadi bukan untuk mencegah babi masuk, tetapi kawatnya sendiri yang dibawa lari sekawanan babi yang mengganas di

kampung itu. Akhirnya, masyarakat memagarinya sendiri dengan bambu dan beberapa perangkat babi. Tiga bulan terakhir ini masyarakat di kemukiman dan Desa Sarah Raya khususnya secara besar-besaran membuka lahan untuk penanaman massal kacang tanah. Dalam pengakuan fasilitator ADRA, mereka menyiapkan, menanam, dan menggugah partisipasi masyarakat untuk komoditas kacang tanah sebanyak 1.000 hektar. Di Sarah Raya sendiri hanya mencapai 40 hektar saja.

Masyarakat Sarah Raya cukup bersemangat saat ada bantuan bibit, walaupun sekadar kacang tanah. Tampak spontanitas kegiatan untuk menyiapkan lahan. Beberapa lahan tidak terpakai langsung dibabat dan dibersihkan. Proyek ini bagi masyarakat adalah harapan baru untuk mendapatkan uang cash. Mereka berharap harga jual dari hasil panennya tetap Rp. 8.000 sesuai janji dari ADRA. Pihak ADRA, menurut masyarakat, tidak sekadar membantu proses tanamnya, tetapi juga mereka telah mempersiapkan jaringan distribusi pemasaran pasca panen. Pihak ADRA sudah bekerjasama dengan PT Kacang Garuda dan Dua Kelinci untuk menerima hasil produksi masyarakat Sarah Raya.

Walaupun demikian, ada kekhawatiran dari masyarakat berupa anjloknya harga jual produksi kacang pasca panen. Tabiat di Aceh,

10. Tanpa mengurangi rasa hormat, cara orang Aceh makan, khususnya masyarakat pedesaan/pedalaman Aceh dapat dikatakan "luar biasa banyak dan luar biasa cepat". Dalam pengamatan beberapa keluarga sepanjang perjalanan riset, setiap kali makan, satu orang bisa menghabiskan dua piring dengan tumpukan nasi penuh. Masalah lauk bukan jadi soal, tetapi kuah menjadi semacam "kewajiban" dari pola makan orang Aceh. Dua piring itu pun dapat dihabiskan dengan cepat, bila dihitung dengan menit, mungkin hanya sekitar 3 menit bila sendirian, dan lima menit bila makan bersama. Pola kebiasaan makan cepat ini bagi orang desa berhubungan dengan kinerja dan kerja di perkebunan. Hal ini menunjukkan adanya etos kerja dan produktivitas sosial ekonomi yang cukup tinggi.

11. 1 ha ditanami 625 batang, selisih jarak tanam serentang 4 meter untuk kualitas tumbuh. Harga per satu bibit Rp. 1.000-2.000, tergantung tinggi pendeknya stek yang ada beserta alat pembungkusnya.

dan mungkin hampir di semua daerah, satu panen semua panen, akibatnya harga langsung anjlok. Hal ini akibat permainan para tauke yang “katanya” sulit membuang produksi ke pasar. Kekhawatiran ini terjadi akibat pengetahuan masyarakat tentang proyek penanaman semangka yang didampingi oleh beberapa NGO di Calang dan Teunom. Semangka seolah hanya menjadi dampingan pemberdayaan ekonomi yang bersifat sekali waktu saja. Begitu tampak adanya fakta secara berurutan “tanam, urus/pelihara, panen, jual, selesai, tidak mau lagi”. Ketika pertama kali menanam, masyarakat penuh semangat. Tetapi, setelah merasakan langsung harga jualnya anjlok di pasar, masyarakat pada umumnya memilih “tutup buku” untuk tidak melanjutkan usaha semacam ini.

Etos dan Produktivitas ditengah Stimulasi Pemberdayaan

Fenomena semacam di atas yang menyebabkan kegagalan program lanjutan pendampingan pemberdayaan ekonomi pertanian di masyarakat pedesaan Aceh. Dan, tentunya bukan sekadar di Aceh saja, tapi juga di wilayah lain di Indonesia. Adanya unsur ketidakjaminan harga produksi pasca panen dan jaringan distribusi yang membuat petani-petani desa lebih memilih untuk tidak melanjutkan jenis usaha yang dipopulerkan oleh pemerintah dan Non Government Organization (NGO) sebelumnya. Karena itu, masyarakat menganggap bahwa penanaman pohon pendek yang bersifat cash crop (tanaman tunai) tidak dapat menjamin secara pasti kebutuhan ekonomi subsistennya, apalagi untuk masa depan keluarganya.

Dari perspektif di atas, tampak ada

kelemahan penanaman “pohon usia pendek”, juga sebelumnya dipaparkan soal kelemahan penanaman atau dampingan pemberdayaan ekonomi di bidang penanaman “pohon usia panjang” beserta uraian keuntungannya masing-masing. Ada sisi di antara dampingan ekonomi jenis ini yang dilupakan banyak orang. Diversifikasi pertanian seolah hanya bersifat keanekaragaman jenis tanaman, tetapi juga diversifikasi dapat bersifat pengunggulan varietas suatu komoditas. Dua jenis dampingan ini bisa dilakukan secara bersama dalam suatu rentang waktu sama, tetapi juga bisa dilakukan secara bergilir seperti petani-petani Jawa yang melakukan urutan tanaman padi, kacang, padi, dan palawija.

Memang ada kendala besar yang kerap menjadi argumentasi lembaga-lembaga pendampingan untuk tidak mau melakukan jenis program semacam itu, yaitu soal dukungan fasilitas sarana dan prasarana, khususnya irigasi? Tetapi argumentasi ini dapat dibantah secara mudah dengan mengajukan ilustrasi dari petani-petani unggul di daerah-daerah yang tidak tersentuh fasilitas itu. Bagaimana misalnya dengan petani-petani padi, kacang, palawija, dan jati di Gunung Kidul yang tidak tersentuh irigasi primer dan sekunder dari sebuah program pemerintah ataupun pendampingan NGO?

Kemandirian, keuletan, kecerdasan lokal, dan kreatifitas merupakan jawab atau argumen dari pertanyaan di atas. Bagaimana hal ini dapat dikelola? Karena itulah program pendampingan pemberdayaan ekonomi tidak semata-mata berdiri sendiri, tetapi juga pendampingan secara sosial dan budaya. Bukan untuk menggurui, Kuntowijoyo pernah memberikan sebuah pernyataan dan tafsir

al-Qur'an terhadap ayat 125 surat an-Nahl yang berbunyi "Serulah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Peneliti tidak mau berdebat "Jalan Tuhan yang mana?." Jelasnya, ia menunjukkan sesuatu yang baik bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya. Kuntowijoyo menafsirkan hikmah berupa kata "dengan kebijaksanaan" yang kemudian dialirkan kembali dalam makna "kebudayaan." Apa artinya? Artinya, pendampingan sosial ekonomi yang mengajak masyarakat agar dapat berdaya dalam menyejahterahkan diri dan masyarakatnya dapat didekati "dengan k e b u d a y a a n . "

Bila kebudayaan beserta mentalitas masyarakat korban bencana seringkali dianggap belum pulih atau belum mau dan mampu bekerja, peneliti tidak melihat fenomena itu di Desa Sarah Raya. Maka, kebudayaan disini bukan harus ditandingi dengan "budaya tandingan rajin." Karena "kebudayaan rajin" telah ada di masyarakat, sampai-sampai prinsip etos bekerjanya mengarah pada satir "disini banyak kerja, tapi sedikit uang." Artinya apa? Bahwa kebudayaan di atas bersifat "dengan kebijaksanaan" melalui jalan-jalan pengetahuan yang sesuai dan menggugah pengetahuan masyarakat atas model pengembangan ekonomi pertanian masyarakat. Bagi orang-orang NGO, kebijaksanaan inilah apa yang disebut strategi.

Di antara potensi penanaman pohon usia pendek dan pohon usia panjang ada sebuah arena kosong. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki potensi semacam itu dapat diberikan dengan upaya gerakan industri rumah tangga

yang dapat memanfaatkan dua jenis tanaman yang dikenal mereka. Ada dua hal yang dapat dilakukan. Strategi ke dalam, yaitu memberikan pengetahuan ke masyarakat untuk aktualisasi diri atas beberapa usaha; strategi keluar, yaitu mencari jalan-jalan keluar sebagai jaringan distribusi pemasarannya agar strategi ke dalam dapat diwujudkan dan berjalan terus menerus dan saling mendukung.

Beberapa orang di Sarah Raya sendiri sebenarnya telah memiliki beberapa usaha-usaha terobosan yang mengarah pada produktivitas ekonomi rumah tangga (home industry). Seorang ibu, bernama Aminah melakukan usaha yang tidak bersifat umum. Ia membuat sambal asam durian. Setiap tiga hari sekali produksinya dikirim ke Teunom sebanyak dua jerigen bervolume masing-masing 20 liter atau sekitar 15-17 kg (30-35kg). Sambal ini dijual per kilo nya sebesar Rp. 4.000-5.000 kepada seorang tauke di pasar Teunom. Rata-rata pendapatan perharinya Rp. 20.000-30.000 setelah dikurangi biaya produksi berupa buah durian, santan, cuka, dan biaya transportasi. Meskipun pendapatan ini kecil, tetapi bagi kehidupan masyarakat Sarah Raya, uang harian sejumlah itu sangat besar nilainya. Apalagi beliau pun masih dapat berkebun pinang, durian, dan coklat, serta bersawah padi.

Dalam kategori ini, Ibu Aminah dapat mengambil peluang antara strategi ke dalam dengan strategi keluar dari penanaman pohon usia pendek dengan pohon usia panjang. Kehadiran industri rumah tangganya menjadi tumpuan ekonomi keluarga seperti membeli lauk, sayur, peralatan mandi, pakaian, biaya sekolah anak, dan hal bersifat keseharian.

Sementara itu, hasil sawah untuk kehidupan sehari-hari (konsumsi pangan-beras). Hasil kebun digunakan keluarga ini untuk memperbaiki rumah, serta membeli tanah, kendaraan dan perhiasan. Sayangnya, model seperti Aminah tidak begitu banyak ditiru oleh masyarakat, khususnya perempuan Sarah Raya. Para ibu memang rajin ke sawah dan ladang, tetapi sekadar fokus pada usaha penanaman pohon usia pendek dan usia panjang saja. Akhirnya, hidup terasa sangat lambat, putaran waktu seolah terhenti, argumen “banyak kerja, sedikit uang” melingkupi kehidupan dari jerih payah dalam etos produktivitasnya.

Mirip dengan Ibu Aminah, Tengku Nashruddin, Kepala Mukim Sarah Raya melakukan usaha pembuatan atap rumbia, seperti welitan tebu dan kelapa di masyarakat Jawa. Satu buah rumbia berukuran 60 cm x 1,5 m dijual seharga Rp. 2.000. Dalam satu hari, setelah dikurangi waktu pekerjaan pokok berkebun, bersawah dan beternak lembu, Tengku Nashruddin dapat membuat sebanyak 12-20 buah rumbia. Jumlah ini tergantung kesiapan bahan bakunya. Masalah pemasaran, menurutnya, konsumen datang sendiri memesan, baik dari Sarah Raya maupun dari Alue Jang. Beberapa pesanan sampai saat dikunjungi peneliti belum dapat terpenuhi, masih sekiataran dua ratusan buah lagi. Bahkan satu bulan pasca tsunami, pesanan rumbia datang dari Meulaboh dan Calang dalam jumlah ribuan buah. Waktu itu, semua anggota keluarga dilibatkan untuk memenuhi pesanan. Selama enam bulan, usaha Tengku Nashruddin kebanjiran pesanan. Dua truk setiap satu bulan, dikeluarkan keluarga ini untuk dikirim ke Calang dan Teunom. Hasilnya, mereka dapat

membeli dua ekor lembu induk dan sebidang tanah kebun seukuran satu hektar. Setelah pembangunan rumah korban tsunami telah dimulai, mereka pun tetap mendapatkan pesanan walau tidak sebesar sebelumnya dari individu masyarakat. Atap rumbia digunakan masyarakat Aceh untuk atap dapur, atap kadang ternak, dan atap lumbung padi yang berada di samping dan belakang rumah. Lembu yang dibeli dari hasil pembuatan rumbia telah beranak tiga. Dari lembu induk peternakan ini, ia pun telah menjual dan menukarkan satu ekor lembu non-induk dengan tiga ekor kambing “Jawa.”

Dari hasil kebunnya digunakan khusus untuk pembiayaan dua orang anaknya yang dikirim sekolah ke dayah (pesantren) Teunom dan Meulaboh. Dari sawahnya, khusus digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Keluarga Tengku Nashruddin menghindarkan diri dari pembelian sepeda motor. Menurutny:

“Bila kami mempunyai uang, lebih baik uang itu dimanfaatkan untuk membeli modal yang bisa berkembang bagi kehidupan kami dan anak-anak kami. Dari dua ekor lembu dapat lahir 10 ekor lembu, dari sebidang tanah, hasil yang diperoleh bisa mencapai berpuluh-puluh bidang tanah; dari pohon yang ditanam bisa memberikan buah tangan untuk anak-anak sekolah; dari itu semua, kami bisa menyiapkan manyam pernikahan, minimalnya enam sampai sepuluh

12. Sepengetahuan peneliti, pihak Kacang Garuda dan Dua Kelinci telah bekerjasama dengan petani-petani di wilayah Kudus, Jepara, Demak, Purwodadi, Gunung Kidul, Wonogiri, dan Karang Anyar. Kualitas kacang tanah dari daerah-daerah ini dianggap paling baik di seluruh Indonesia. Biji kacang yang terdapat dalam produksi PT Garuda diwajibkan minimalnya tiga biji, sedangkan PT Dua Kelinci membolehkan kacang dua biji, tetapi dengan syarat dua biji gemuk. Harga belinya tidak sampai Rp. 8.000; tetapi Rp. 4.000-5.000 per kilo kacang kering. Tidak ada informasi yang valid bahwa kacang Garuda dan Dua Kelinci siap menerima produksi dari petani-petani di Aceh.
13. Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 163.

manyam saat mereka melamar nantinya, sekaligus dapat mewariskan pendidikan dan harta non-makan (konsumtif-pen) kepada generasi setelah kami.”

Jalinan antara prinsip hidup, pemberdayaan dan siasat ekonomi, serta harapan masa depan tampak begitu terasa adanya ruh kerja keras. Kaitan erat seperti ini dapat menjadi basis kebudayaan beserta strategi pendampingan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dalam semua lapisannya. Apa yang terpapar itu menjadi harapan dari individu-individu Sarah Raya, seperti Tengku Nashruddin dan Ibu Aminah. Pernah suatu kali, Tengku Nashruddin bercerita:

“Dahulu orang Aceh dikenal ulet dan pekerja keras. Sepanjang pantai Calang-Blang Pidie (pantai barat-pen), sebelum tsunami banyak orang/muge hilir mudik mengangkut ikan ke gunung-gunung. Ada yang menggunakan pikulan, gerobak hewan, sepeda, dan ada pula sepeda motor DKT-an. Meskipun untungnya sedikit, mereka tetap berusaha. Sekali berangkat mereka terbiasa menginap dua sampai tiga malam. Di samping menjual ikan dari bawah, mereka pun mengumpulkan buah pala, lada, pinang, cokelat, kopi, atau apapun yang mereka dapat temukan dari masyarakat-masyarakat di gunung. Kedai-kedai di sepanjang jalan sebenarnya untuk tempat mereka menginap dan berjualan atau menerima panen petani dari gunung. Kedai menjadi tempat pertemuan antara si penjual dengan si pembeli, sekaligus tempat barter barang terjadi.

manyam saat mereka melamar nantinya, sekaligus dapat mewariskan pendidikan dan harta non-makan (konsumtif-pen) kepada generasi setelah kami.”

Jalinan antara prinsip hidup, pemberdayaan dan siasat ekonomi, serta harapan masa depan tampak begitu terasa adanya ruh kerja keras. Kaitan erat seperti ini dapat menjadi basis kebudayaan beserta strategi pendampingan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dalam semua lapisannya. Apa yang terpapar itu menjadi harapan dari individu-individu Sarah Raya, seperti Tengku Nashruddin dan Ibu Aminah. Pernah suatu kali, Tengku Nashruddin bercerita:

“Dahulu orang Aceh dikenal ulet dan pekerja keras. Sepanjang pantai Calang-Blang Pidie (pantai barat-pen), sebelum tsunami banyak orang/muge hilir mudik mengangkut ikan ke

14. Tengku Nashruddin adalah mantan combatan GAM. Di tahun 1988-1997, dan 1998-2000 ia adalah geuchik Sarah Raya. Sewaktu tahun 2000 ia terlibat perjuangan GAM, pernah masuk hutan. Tugasnya adalah memberikan bimbingan rohani dan pemetaan wilayah kepada para anggota GAM dari kelaskaran Geumpang. Namun, di tahun 2003, ia memilih keluar dari GAM karena beberapa prinsip perjuangan yang bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya. Bisa dikatakan, ia masuk sebagai kelompok elite di lapangan. Keluarnya tidak begitu membuat pihak GAM untuk menyingkirkannya. Setelah keluar GAM, ia kemudian menjalani masa rehabilitasi diri di Koramil Kecamatan Teunom. Sampai pihak militer dan pemerintah menyetujuinya untuk kembali ke tengah masyarakat Sarah Raya. Sosok pribadinya sangat cerdas, santun bertutur, pandai agama, taat beribadah, dan tidak pernah mengenal rasa takut. Orang ini bukan jenis pencuriga, seperti kebanyakan orang Sarah Raya. Tampak begitu besar rasa welcomenya kepada setiap orang, tidak pernah ada dugaan bahwa sebelumnya ia seorang anggota GAM. Sebab-sebab Tengku Nashruddin masuk GAM karena waktu itu ia sangat muak melihat perilaku aparat kecamatan dan aparat ABRI/Polri. Sebagai kepala desa, posisinya adalah penentu kebijakan dan pelaksana program di tingkat desa, namun tidak pernah ada kesempatan untuk itu. Ia seolah menjadi “suruhan” yang bekerja sesuai perintah pak camat dan Koramil. Membela warga yang dituduh GAM dianggap salah, padahal warga itu betul-betul bukan GAM. Membiarkannya juga salah, karena keselamatan dan keamanan warga adalah tanggungjawabnya. Bagaimana sikap keluarganya nanti bila ia sebagai geuchik tidak dapat memberikan keamanan bagi masyarakatnya. Dari sekian kemukakan, tak jarang ia sendiri dipaksa untuk menandatangani pertanggungjawaban proyek yang tidak pernah ada fakta di lapangannya. Bila diberikan dananya untuk pembangunan sarana desa, jumlahnya hanya mencapai 10 persen dari keseluruhan biaya proyek. Selebihnya menjadi “mainan dan makanan” dari Camat dan Koramil. Mereka juga memiliki banyak isteri di beberapa tempat. Perilaku bobrok itulah yang membuat ia harus bergabung dengan GAM yang kerap mendengungkan citra bersih, citra islami, dan ketegasan dan kejujuran dalam bersikap. Setelah bergabung dengan GAM, Tengku Nashruddin pun akhirnya kembali ke masyarakat, meskipun ia kemudian menghindari jabatan formal sebagai kepala desa, agar sakit hati tidak lagi menggeranyuti kehidupannya. Karena pengalamannya itu, dan faham atas batas-batas pemetaan wilayah di kemukiman Sarah Raya, akhirnya atas dasar musyawarah bersama, Tengku ini dipilih sebagai Kepala Mukim Sarah Raya yang membawahi enam desa.

gunung-gunung. Ada yang menggunakan pikulan, gerobak hewan, sepeda, dan ada pula sepeda motor DKT-an. Meskipun untungnya sedikit, mereka tetap berusaha. Sekali berangkat mereka terbiasa menginap dua sampai tiga malam. Di samping menjual ikan dari bawah, mereka pun mengumpulkan buah pala, lada, pinang, coklat, kopi, atau apapun yang mereka dapat temukan dari masyarakat-masyarakat di gunung. Kedai-kedai di sepanjang jalan sebenarnya untuk tempat mereka menginap dan berjualan atau menerima panen petani dari gunung. Kedai menjadi tempat pertemuan antara si penjual dengan si pembeli, sekaligus tempat barter barang terjadi. Ada ikan sekilo atau seekor ditukar dengan dua kilo pinang, ada ikan ditukar dengan kopi. Pokoknya, apapun yang dirasa ada keuntungannya mereka lakukan secara sungguh-sungguh.

Apa yang dinyatakan oleh Tengku Nashruddin adalah suatu kegelisahan yang menimpa sebagian besar masyarakat Aceh pasca bencana alam. Sekalipun saat ini masih terlihat tinggi dalam etos dan produktivitasnya, namun bagi orang-orang tua Aceh dengan segenap pengalaman sebelumnya dianggap bahwa etos dan produktivitas sebagian besar masyarakat menurun. Penurunan ini disebabkan oleh program dan kebijakan dari pemerintah dan NGO yang kurang tepat, dan lebih berorientasi pada penyediaan segala sesuatu yang bersifat tunai, baik bibit tanaman ataupun uang bantuan lainnya untuk

pengembangan diversifikasi pertanian atau peningkatan kesejahteraan keluarganya. Bantuan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, namun ketika ia dilakukan terus menerus oleh banyak lembaga, maka masyarakat akhirnya tergantung dan memiliki harapan besar kepada bantuan ketimbang menjalani usaha produktifnya sebagaimana yang diwariskan dari masa-masa sebelumnya.

Potret etos dan produktivitas masyarakat Sarah Raya seperti ini sebenarnya hampir serupa dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang berada di wilayah bukit Barisan ataupun wilayah lainnya yang mendapatkan sentuhan program dan kebijakan yang berlebihan dari berbagai pihak. Etos produktivitas sebagai kekuatan internal masyarakat seringkali "dilemahkan" oleh bantuan dan program yang menawarkan 'harapan' kesejahteraan. Padahal keduanya seharusnya berjalan bersama dan saling menguatkan, sehingga mampu memantik peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itulah, salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pemahaman dan internalisasi yang kuat agar masyarakat tetap berada pada etos produktivitasnya yang tinggi, dan mampu memanfaatkan berbagai kebijakan dan program pemerintah terkait pembangunan untuk menghadirkan peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.

Simpulan

Kenyataan bahwa etos dan produktivitas kelompok-kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan jejak ekologis yang ada di sekitarnya terlihat jelas di masyarakat Sarah Raya Aceh.

15. Peneliti melihat langsung kedatangan seseorang dari Alue Jang yang memesan rumbia sebanyak 150 buah. Ia bermaksud menggunakan rumbia itu untuk kandang ternaknya.
16. Wawancara dengan Tengku dan istri Nashruddin, di Sarah Raya, 18 Mei 2010.

Keberadaannya di sepanjang bukit Barisan telah menghantarkannya menjadi petani yang baik dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam memanfaatkan lahan pertaniannya untuk berbagai jenis tanaman yang menghasilkan. Etos dan produktivitas seperti itu berlangsung secara lama dan lintas generasi. Sayangnya, pasca bencana tsunami di wilayah bawahnya, masyarakat di Sarah Raya juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam etos dan produktivitasnya. Mereka mulai meninggalkan kebiasaan pertanian lamanya, dan lebih memilih menjadi petani yang “cepat saji” sesuai dengan bantuan bibit yang diberikan oleh berbagai pihak. Pilihan ini tentu sarat dengan unsur spekulatif, karena selain bukan kebiasaan etos pertaniannya, mereka juga dihadapkan pada fenomena ketergantungan terhadap pihak lain, baik terkait harga, ketersediaan bibit, pasokan pupuk, dan lainnya. Etos kemandirian tergantikan menjadi etos ketergantungan.

Oleh karena itulah, apa yang dilakukan oleh beberapa sosok anggota masyarakat di Sarah Raya dapat menjadi contoh penting dalam pendampingan dan pemberdayaan bidang ekonomi sosial masyarakat wilayah pegunungan atau pedalaman. Beberapa aspek penting dicatat, diberi tambahan pola dan strateginya, tetapi beberapa aspek lain dapat dihilangkan atau diperbaiki. Umumnya pihak pemerintah dan NGO terjebak pada program yang bersifat sementara saja, seandainya pemerintah misalnya sekadar mengikuti pola penawaran penanaman pohon usia pendek seperti kegiatan NGO lainnya, maka pihak pemerintah akan kembali terjebak pada keumuman sifat dan strategi parsial dan

jangka pendek sebagaimana program-program sebelumnya. Artinya, tidak ada karakteristik dan strategi baru yang ditawarkan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dengan model masyarakat seperti ini.

Daftar Pustaka

- Humaedi, M. Alie. Kebudayaan Lokal ditengah Kebijakan Pembangunan. Dalam Jurnal Kajian, Vol. 2014, No. VII.
- Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Bandung: Mizan, 2002.
- Reid, Anthony. The Contest for Sumatra Acheh, the Netherlands and Britain 1858-1898, New York: Oxford University Press, 1969.

Data etnografis dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, nama terlampir.